

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Legitimasi

Ada beberapa teori yang mendukung penyampaian pengungkapan akuntansi lingkungan, salah satunya adalah teori legitimasi (Deegan, 2002:292). Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan beroperasi dalam batasan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di sekitar perusahaan itu berada. Menurut Deegan dan Rankin (1996) inti dari Teori Legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Ghozali dan Chairiri (2007) mengemukakan bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung melakukan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. (Zahra Husna, 2015)

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) dalam Nor Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat sumberdaya bagi

perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*” (Lako, 2011:5)

2.1.2. Teori Stakeholder

Teori lain yang mendukung penyampaian laporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan adalah Teori *Stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011:5)

Ghazali dan Chairiri (2007) mengatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat bergantung oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Karena, selain beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga beroperasi untuk memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak lain).

2.1.3 Teori Kontrak Sosial

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi.2011:96).

Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate* (Deegan,dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya (Rawl, dalam Nor Hadi.2011:97).

2.1.4. Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

2.1.4.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi keuangan perusahaan karena kegiatan akuntansi tersebut dilakukan secara rutin. Di dalam akuntansi akan dilakukan pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak - pihak yang berkepentingan. Seorang Akuntan harus mengukur kinerja secara akurat, wajar, dan tepat waktu, agar para ,manajer dan perusahaan yang dapat menarik modal investasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan para manaje modern adalah informasi akuntansi. Oleh karena itu, para manajer dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan data akuntansi. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat inilah yang menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants*(AICPA) (2009), menjelaskan bahwa akuntansi adalah :“...seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil – hasilnya.”

Menurut *Accounting Principle Board Statement* No. 4, mendefinisikan bahwa akuntansi adalah :“...suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif”.

Menurut Warren dkk (2011:9) dalam Damayanti Dian bahwa, akuntansi (*accounting*) adalah “...suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi atau kejadian dalam suatu cara tertentu dan dalam ukuran uang. Semua transaksi yang bersifat keuangan, transaksi keuangan dalam hal ini diartikan sebagai suatu kejadian atau keadaan yang mempunyai nilai uang dan harus tercatat sesuai dengan transaksi.

2.1.4.2. Definisi Lingkungan

Menurut Darsono (1995) pengertian lingkungan adalah “...bahwa semua benda dan kondisi termasuk manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang dimana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan – badan hidup lainnya”.

Menurut StMunajat Danusaputra, lingkungan adalah: “... semua benda dan konisisi termasuk di dalamnya manusia dan aktifitas, yang terdapat dalam

ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasad renik lainnya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengertian lingkungan adalah “....kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat 1)”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.4.3. Definisi Akuntansi Lingkungan

Menurut Ikhsan (2008:14) bahwa akuntansi lingkungan adalah:”...pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut”.

Andreas Lako (2011) mendefinisikan bahwa “...*green accounting*/akuntansi lingkungan sebagai paradigma baru akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya pada transaksi-transaksi atau peristiwa keuangan (*financial/profit*), tapi juga pada transaksi-transaksi atau peristiwa sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*)”.

Cohen dan Robbins (2011:190) menjelaskan aktivitas dalam akuntansi lingkungan sebagai berikut:”...*environmental accounting collects, assesses, and prepare reports of both environmental and financial data with a view loward reducing environmental effect and costs. This form of accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development*”.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa aktivitas akuntansi lingkungan meliputi mengumpulkan, menganalisis, menilai, dan mempersiapkan laporan baik dari data lingkungan maupun keuangan dengan maksud untuk mengurangi efek dan biaya lingkungan. Bentuk akuntansi ini telah menjadi aspek kunci dari bisnis penghijauan dan pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan berbagai definisi akuntansi lingkungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan merupakan salah satu jenis akuntansi yang di dalamnya mendfeisikan, menilai, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.

2.1.4.4. Fungsi dan Tujuan Akuntansi Lingkungan

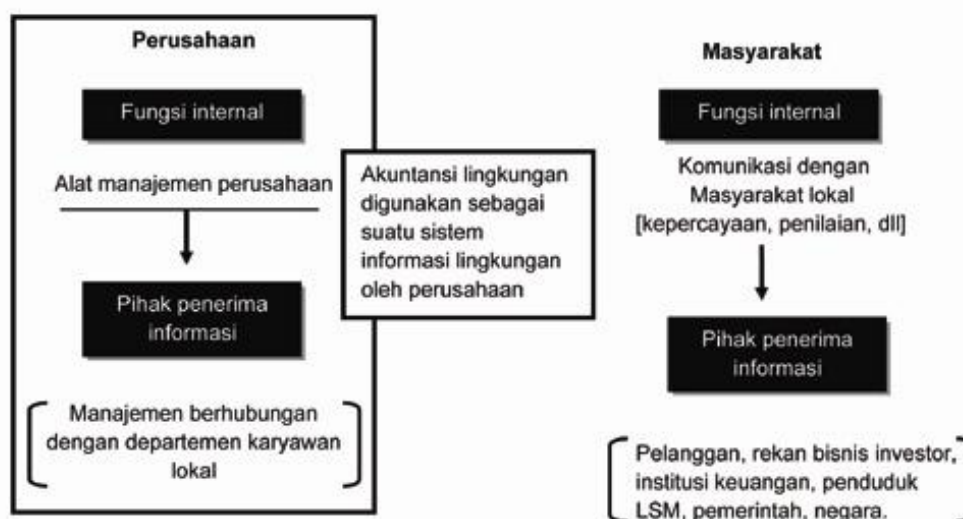
Penggunaan akuntansi lingkungan tidak hanya berfungsi untuk perusahaan atau organisasi saja, akan tetapi akuntansi lingkungan juga memiliki fungsi diluar fungsinya untuk perusahaan. Menurut Arfan Ikhsan (2009, hlm.32) akuntansi lingkungan memiliki fungsi internal dan fungsi ekstenal, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana hanya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengukur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

2. Fungsi Eksternal

Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kegiatan pelestarian lingkungan. Fungsi eksternal memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan *stakeholder*. Diharapkan bahwa publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi baik sebagai alat bagi organisasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas akuntabilitas kepada *stakeholder* dan secara bersamaan, sebagai sarana untuk evaluasi yang tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan. (Zahra Husna, 2015). Baik fungsi internal maupun fungsi eksternal pada dasarnya merupakan satu kesatuan utuh (*holistic*) yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat. keterkaitan antara kedua fungsi tersebut dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat

Sumber ; Ministry of the Environment Japan, 2005 dalam Ikhsan (2009, hlm 37)

Tujuan dari konsep akuntansi lingkungan sendiri disebutkan dalam bukunya oleh Arfan Ikhsan (2009, hlm 21) yang meliputi :

1. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan
Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun guna menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat
Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negative lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari berbagai pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian lingkungan.

2.1.4.5. Peraturan yang terkait dengan Akuntansi Lingkungan

Dikutip dari Zahra Husna (2015) ada beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dan pengungkapan akuntansi lingkungan adalah :

1. “Undang – undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU ini diatur kewajiban bagi setiap penanaman modal berbentuk badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.
3. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mewajibkan bagi perseroan yang terkait dengan sumber daya alam

untuk memasukkan perhitungan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No:KEP- 134/BL/2006 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. UU ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) harus menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBL/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktivas Bagi Bank Umum. Dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan kredit perbankan, harus mampu memperlihatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan lima peringkat perusahaan akan diperingkat berdasarkan keberhasilan dalam pengelolaan limbahnya”.

2.1.4.6. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Ikhsan, (2008, hlm. 131) menyatakan bahwa kata pengungkapan. (*Disclosure*) memiliki arti “...tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Yang berarti, pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Pengungkapan data akuntansi lingkungan yang sesungguhnya tersebut dimaksudkan agar *stakeholder* dapat memahami data akuntansi lingkungan secara konsisten”.

Andreas Lako (2011) mengatakan bahwa pelaporan informasi akuntansi lingkungan mencakup informasi mengenai:

1. “Kontribusi lingkungan alam, energi, sumber daya manusia (karyawan) dan masyarakat.
2. Dampak – dampak yang positif dan negative dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan alam, energy, karyawan, dan masyarakat.
3. Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah ekologis”.

2.1.4.7. Peran Akuntan Dalam Masalah Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini lingkungan dan perekonomian sudah saling berkaitan. Akibatnya, akuntansi dan para akuntan dapat berperan dalam membantu masalah penanganan lingkungan. Menurut Gray (1993) ada lima tahap bagi akuntan untuk membantu manajemen mengatasi masalah lingkungan, yaitu :

1. “Sistem akuntansi yang ada saat ini dapat dimodifikasikan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dalam hubungannya dengan masalah pengeluaran atau biaya, seperti biaya kemasan, biaya hukum, biaya sanitasi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan efek lingkungan.
2. Hal – hal yang bersifat negatif dari sistem akuntansi saat ini perlu diidentifikasi, seperti masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan.
3. Perlunya system akuntansi yang memandang jauh ke depan dan lebih peka terhadap munculnya isu – isu baru yang berkaitan dengan lingkungan yang terus dan semakin berkembang.
4. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dalam proses berubah, seperti misalnya berubah ukuran kerja perusahaan di masyarakat.
5. Akuntansi yang baru dari system informasi memerlukan pengembangan seperti pemikiran tentang kemungkinan adanya “*eco balance sheet*”.

2.1.4.8. Indikator Pengungkapan akuntansi lingkungan

Indikator pengungkapan akuntansi lingkungan dapat dinilai berdasarkan sebagai berikut:

1. Teori Andreas Lako

Indikator berdasarkan teori ini menggunakan metode *Content analysis* atau menganalisis isi dari laporan tahunan. Berikut adalah indikator dari masing – masing dimensi yang disebutkan dalam teori Andreas Lako:

Tabel 2.1

Indikator dari Dimensi dalam Teori Andreas Lako

No	Dimensi	Indikator
1	Kontribusi lingkungan alam, energi, sumber daya manusia (karyawan) dan masyarakat	1. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan; 2. Upaya Efisiensi Energi; 3. Upaya penurunan Emisi; 4. Implementasi Reduce, Rause, Recyle limbah B3 dan non B3; 5. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Air; 6. Perlindungan Keanekaragaman Hayati; 7. Program pengembangan Masyarakat.
2	Dampak-dampak yang positif dan	1. Dampak positif dari aktivitas

	negatif dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan alam, energi, karyawan, dan masyarakat	bisnis perusahaan; 2. Dampak negatif dari aktivitas bisnis perusahaan.
3	Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan	1. Pengendalian Pencemaran Air; 2. Pengendalian Pencemaran Udara; 3. Pengendalian Limbah B3; 4. Pengendalian Pencemaran Air Laut; 5. Potensi Kerusakan Lahan.

Sumber : Andreas Lako (2011)

Untuk menghitung jumlah pengungkapan akuntansi lingkungan tersebut digunakan rumus:

$$IP_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

IP_j : Indeks pengungkapan akuntansi lingkungan perusahaan j

$\sum X_{ij}$: jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j pada tahun i

N_j : jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan j. $n_j \leq 14$

Penjelasan dari indikator dari dimensi dalam pengungkapan akuntansi lingkungan menurut Andreas Lako, yaitu:

1. Kontribusi lingkungan alam, energi, sumber daya manusia (karyawan) dan masyarakat:

- 1) Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan

Dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001:2015 yaitu :

- a. Kebijakan

Pada langkah pertama, penilaian SML mempertimbangkan karakteristik, skala kegiatan, dan dampak pada pekerjaan sebuah industri terhadap kehidupan sekitar. Komitmen perusahaan terhadap perbaikan yang bersifat berkelanjutan serta komitmen untuk taat terhadap segala peraturan juga berdampak pada hasil penilaian SML. Hal-hal tersebut dapat tercermin dalam tujuan dan sasaran lingkungan dari semua lini perusahaan.

- b. Perencanaan

Perusahaan harus mengelola perencanaan SML secara terstruktur, *up to date*, dan jelas. Selain itu harus ada jaminan bahwa perusahaan telah taat pada aturan. Sehingga tujuan, sasaran, target, dan indikator keberhasilan dapat terpenuhi dan menunjang penilaian.

- c. Implementasi

Dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat, semua lini dalam perusahaan harus berperan. Pelatihan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bagi karyawan dalam suatu perusahaan dalam menerapkan SML. Disamping peran dari seluruh karyawan, maka perlu dilakukan dokumentasi pada setiap kegiatan. Selanjutnya diperlukan pengontrolan untuk dokumentasi sendiri serta operasional, sehingga sistem tanggap darurat diperlukan pula untuk mengatasi ketika terjadi kesalahan.

- d. *Checking & Corrective Action*

Langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai macam cara, dan tentunya tujuannya sama yaitu untuk mengevaluasi dan memperbaiki. Metodologi yang dirasa tepat untuk kriteria ini adalah dengan pemantauan dan pengukuran, identifikasi ketidaksesuaian, upaya perbaikan dan pencegahan, pencatatan, dan audit SML.

- e. *Review by Manegement*

Langkah ini merupakan tahapan akhir dari siklus penerapan SML, namun akan dilakukan siklus berulang. Tahapan ini berfungsi untuk menjamin *sustaibility, adequacy dan effectiveness* dari penerapan SML. *Review* ini dapat membahas tentang perlunya perubahan kebijakan, tujuan, dan unsur lainnya dalam SML berdasarkan hasil audit.

2) Upaya efisiensi energi

Penggunaan energi yang efisien, kadang-kadang disebut efisiensi energy, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyediakan produk dan layanan. Misalnya, isolasi rumah memungkinkan bangunan untuk lebih sedikit menggunakan energy untuk pendinginan dalam mencapai dan mempertahankan suhu yang nyaman. Menurut badan Energi Internasional, meningkatkan efisiensi energy di gedung-gedung, industri dan transportasi dapat mengurangi kebutuhan energi dunia pada tahun 2050 dengan sepertiga, dan akan membantu mengendalikan emisi global gas rumah kaca. Contoh lainnya adalah:

1. Peralatan

Misalnya dengan pembangunan tambang besar yang metode kerjanya lebih efisien, serta ekstensifikasi operasional KIP untuk menggantikan peran KK yang boros energi. Dan juga perusahaan mengembangkan teknik pemanfaatan energi terbaru dalam operasionalnya, yaitu olein yang berbahan dasar minyak sawit.

2. Rancang bangun bangunan

Lokasi bangunan dan lingkungan memainkan peran kunci dalam mengatur suhu dan pencahayaan. Misalnya, pohon, lansekap, dan bukit-bukit dapat memberikan keteduh dan penghalang angin. Dalam iklim dingin, merancang bangunan belahan bumi utara dengan selatan menghadap jendela dan bangunan belahan bumi selatan dengan utara menghadap jendela meningkatkan jumlah matahari memasuki gedung, meminimalkan penggunaan energi, dengan memaksimalkan pemanasan surya secara pasif. Desain bangunan yang baik, termasuk jendela yang hemat energi, pintu yang tertutup, dan isolasi termal tambahan dinding, dan isolasi dapat mengurangi hilangnya panas. Desain bangunan hemat energi yang efektif dapat mencakup penggunaan biaya rendah dengan menggunakan Passive Infra Red (PIRs) untuk mematikan lampu ketika ruangan yang tidak ditempati seperti toilet, koridor atau bahkan area kantor diluar jam kantor. Selain itu, tingkat intensitas cahaya dapat dimonitor menggunakan sensor cahaya untuk mengaktifkan / menonaktifkan atau

meredupkan pencahayaan dengan memperhitungkan cahaya alami dengan demikian mengurangi konsumsi energi. Sistem Manajemen Gedung (SMG) menghubungkan semua ini bersama-sama dalam satu komputer terpusat untuk mengontrol pencahayaan dan kebutuhan daya seluruh. Desain bangunan hemat energi yang efektif dapat mencakup penggunaan biaya rendah dengan menggunakan *Passive Infra Reds* (PIR) untuk mematikan lampu ketika ruangan yang tidak ditempati seperti toilet, koridor atau bahkan area kantor diluar jam kantor. Selain itu, tingkat intensitas cahaya dapat dimonitor menggunakan sensor cahaya untuk mengaktifkan menonaktifkan atau meredupkan pencahayaan dengan memperhitungkan cahaya alami dengan demikian mengurangi konsumsi energi. Sistem Manajemen Gedung (SMG) menghubungkan semua ini bersama-sama dalam satu komputer terpusat untuk mengontrol pencahayaan dan kebutuhan daya seluruh bangunan.

3. Kendaraan

Efisiensi energi taksiran mobil adalah 280 Passenger-Mile/106 Btu. Ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi energi kendaraan. Menggunakan peningkatan aerodinamis untuk meminimalkan hambatan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Mengurangi berat kendaraan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bahan bakar, itulah sebabnya mengapa material komposit yang banyak digunakan dalam badan mobil. Efisiensi energi taksiran mobil adalah 280 Passenger-Mile/106 Btu. Ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi energi kendaraan. Menggunakan peningkatan *aerodinamis* untuk meminimalkan hambatan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Mengurangi berat kendaraan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bahan bakar, itulah sebabnya mengapa material komposit yang banyak digunakan dalam badan mobil.

3) upaya efisiensi emisi

1. Emisi gas rumah kaca

Cara yang dilakukannya dengan operasi siklon atau ESP untuk mengurangi kadar debu dan partikulat.

2. Emisi gas penipis lapisan ozon

3. Emisi gas NO_x dan SO_x

Menerapkan teknologi flue gas desulphurization dilengkapi secara baghouse filter, yang mampu menurunkan total emisi gas SO_x

4. Menggunakan transportasi umum

Satu alat transportasi yang digunakan bersamaan akan menggunakan energi dengan lebih efisien. Alternatif lainnya, pilihlah transportasi yang hemat bahan bakar.

5. Menanam pohon di lingkungan sekitar

Ini adalah cara yang paling alami – pohon menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida.

6. Menggunakan peralatan yang hemat energi
Pastikan peralatan elektronik yang Anda gunakan ramah lingkungan dan hemat energi.

4) Implementasi Reduce, Rause, Recyle limbah B3 dan non B3;

a. *Recycle*

1. Memilah antara sampah organik dan non organik
2. Mendaur ulang segala yang dapat didaur ulang: plastik, kupasan buah segar dan sayur mayur, kertas dan kardus, gelas dan kaleng.

b. *Rause*

1. Memilih alat rumah tangga atau elektronik yang hemat energi
2. Mencari merk yang memperhatikan lingkungan
3. Menggunakan tas belanja yang mudah didaur ulang
4. Menggunakan kendaraan umum untuk bepergian
5. Mulai menggunakan energi bahan bakar alternatif yang tidak hanya dari bahan energi fosil, misalnya biogas, biodisel, surya sel dsbnya, minyak sawit
6. Mengurangi emisi CFC dan emisi pengganti CFC dengan tidak menggunakan aerosol dan menggunakan energi efisien.
7. Memilih peralatan yang mempunyai usia pakai lebih lama

c. *Reduce*

1. Memakai listrik seperlunya
2. Menanam pohon untuk menyerap gas karbon dioksida yang ada di udara.
3. Hemat dalam menggunakan air
4. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang tidak begitu jauh <5 km
5. Mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak dapat didaur ulang
6. Mengurangi penggunaan produk yang tingkat kebutuhannya rendah.

5) Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Air

Konservasi sumber daya air sebagai pengendalian, pemanfaatan terhadap sumber daya air dalam rangka memelihara atau melindungi dan mencegah pengurangan kapasitasnya sedangkan hemat air diartikan sebagai upaya meningkatkan efisiensi pemanfaatan air. Pemerintah Kota Probolinggo menyadari akan pentingnya kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya di masa mendatang, terlebih

lagi sampai saat ini suplay air bersih PDAM masih bergantung dari Kabupaten Probolinggo. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo disertai dengan semakin meningkatnya migrasi yang masuk ke Kota Probolinggo maka diperkirakan akan mengalami kesulitan air bersih apabila masih mengandalkan suplay air dari daerah Kabupaten Probolinggo. Untuk itu perlunya upaya-upaya konservasi sumber daya air (sumber mata air dan sungai) yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber bahan baku air PDAM.

Berbagai upaya Konservasi untuk Pengendalian pencemaran air tersebut meliputi; penurunan beban pencemar air (industri dan domestik), meningkatkan pengawasan tata cara pembuangan air limbah, sosialisasi pengelolaan air, gerakan penghijauan serta adanya dukungan dari masyarakat untuk bersih-bersih sungai dan berbagai upaya efisiensi terhadap pemanfaatan air. Kegiatan konservasi sumber daya air dilakukan antara pemerintah swasta dan masyarakat, karena hampir semua aktifitas masyarakat berpotensi mencemari sumber air. Kegiatan konservasi yang telah dilakukan meliputi:

1. Menerbitkan peraturan perundang-undangan pengendalian, perlindungan dan pencegahan pengurangan kapasitasnya badan air antara lain : Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kawasan Lindung, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Kota Probolinggo, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengolahan Kualitas Air, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Air Hujan, Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
2. Meningkatkan pengawasan terhadap air limbah yang dapat mencemari air permukaan dan air tanah, dengan kegiatan melakukan pengawasan secara rutin terhadap industri atau kegiatan masyarakat yang dapat mencemari air permukaan dan air.
3. Pemantauan kualitas air, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan untuk menganalisa sampel limbah industri, menguji kualitas air sungai dan air tanah (sumur).
4. Meningkatkan sosialisasi pencegahan pencemaran air bagi masyarakat.
5. Strategi penurunan beban pencemar air, dengan dibangunnya IPAL komunal dan jamban komunal .

6. Pembersihan dan Penanaman di sumber mata air dilakukan bersama masyarakat.
7. Program KB2S2 (Kita Bersih-bersih Sungai dan Saluran) yang dilaksanakan di Kali Banger.
8. Di bangunnya rumah kompos di sekitar sungai, agar masyarakat sekitar tidak membuang kotoran ternak ke sungai melainkan diolah menjadi pupuk kompos.
9. Kegiatan konservasi yang melibatkan siswa-siswa sekolah, antara lain : Detektif Kecil Sungai (Dik Sun), Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling), Pemanfaatan air wudhu untuk kolam ikan dan menyiram tanaman di beberapa sekolah Adiwiyata Kota Probolinggo, Pemanfaatan arus sungai untuk menggerakkan turbin sehingga dihasilkan energi listrik (Mikrohidro) di SMKN I, Pembuatan lubang biopori sebagai resapan yang tersebar di perkantoran, perumahan, sekolah dan lingkungan industri.

6) Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Agar keanekaragaman makhluk hidup dapat terus lestari dan mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia, pemanfaatannya harus secara bijaksana. Beberapa usaha penyelamatan dan pelestarian keanekaragaman makhluk hidup yang dilakukan perusahaan pertambangan sebagai berikut.

- a. Perencanaan reklamasi yaitu dengan survey lahan dan observasi
- b. Penyediaan lahan yaitu dengan mendorong *tailing* ke kolong, meratakan gundukan *tailing*, mengangkut lahan.
- c. Penanaman tanaman yaitu dengan aplikasi ameliora tanah, pengisian media tanam, penanaman tanaman, pelindung tanam.
- d. Pemantauan dan pelaporan, yaitu dengan pemantauan, pertumbuhan, pemantauan kualitas dan pelaporan.

Perlindungan (konservasi) keanekaragaman hayati bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Konservasi dibagi dua macam, yaitu:

1. In Situ

In situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan pada habitat asli. Misalnya memelihara ikan yang terdapat di suatu danau yang dilakukan di danau tersebut, tidak dibawa ke danau lain atau sungai. Ini dilakukan agar lingkungannya tetap sesuai dengan lingkungan alamnya. Meliputi 7 kategori, yaitu cagar alam, suaka margasatwa, taman laut, taman buru, hutan, atau taman wisata, taman provinsi, dan taman nasional.

2. Ex Situ

Ex situ adalah konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat asli, namun kondisinya diupayakan sama dengan habitat aslinya. Perkembangbiakan hewan di kebun binatang merupakan

upaya pemeliharaan ex situ. Jika berhasil dikembangbiakan, sering kali organisme tersebut dikembalikan ke habitat aslinya. Contohnya, setelah berhasil ditangkap secara ex situ, jalak Bali dilepaskan ke habitat aslinya di Bali. Misalnya: konservasi flora di Kebun Raya Bogor dan konservasi fauna di suaka margasatwa Way Kambas, Lampung.

Upaya melestarikannya juga meliputi ekosistem di suatu wilayah. Perlindungan tersebut di antaranya:

1. Cagar Alam

Cagar alam adalah membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya. Perkembangannya terjadi secara proses alami. Manusia dilarang memasukinya tanpa izin khusus. Cagar alam bertujuan untuk:

- a. melindungi ciri khas tumbuhan, hewan, dan ekosistem alami
- b. mempertahankan keanekaragaman gen
- c. menjamin pemanfaatan ekosistem secara berkesinambungan proses ekologi. Contohnya Cagar Alam Pangandaran (Jawa Barat).

2. Suaka Margasatwa

Merupakan pelestarian satwa langka. Perburuan dibuatkan peraturan tertentu. Satwa langka dilindungi oleh undang-undang konservasi, sehingga kepemilikannya harus memiliki izin khusus.

3. Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Taman nasional dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional juga berfungsi melindungi ekosistem, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna, dan melestarikan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Beberapa taman nasional tersebut misalnya Taman Nasional (TN) Gunung Leuser (Aceh dan Sumatra Utara), TN Kerinci Seblat (Sumatera Selatan dan Bengkulu).

4. Taman Laut

Taman laut adalah wilayah lautan yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi dan indah. Kawasan ini dijadikan sebagai konservasi alam, misalnya Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara.

Konservasi alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di masa kini dan masa mendatang. Konservasi alam meliputi tiga hal, yaitu:

- a. perlindungan, meliputi proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan. Misalnya, perlindungan siklus udara dan air
- b. pelestarian, melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

- c. pemanfaatan, memanfaatkan secara bijaksana sumber daya alam dan lingkungannya.

5. Rehabilitasi Laut

Kegiatan yang dilakukan adalah penanaman bakau, penanaman bibit bakau bersama yayasan, penenggelaman rumpon, dan penanaman tanaman pantai.

6. Kebun Raya

Kebun raya adalah kebun buatan yang berguna untuk menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk dilestarikan. Selain itu, kebun raya ialah Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi (Jawa Timur). Masyarakat awam hendaknya tidak memelihara hewan atau tumbuhan langka yang rawan punah. Memelihara burung, kera, atau orang utan di rumah akan menyebabkan hewan-hewan tersebut semakin cepat punah. Sebaiknya, hewan tersebut dibiarkan hidup secara alami atau diserahkan pemeliharaannya kepada orang yang ahli agar ditangkarkan dan kemudian dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Kita dapat berperan serta untuk melestarikannya dengan memelihara hewan atau tumbuhan hasil penangkaran atau budi daya, misalnya burung kenari, ikan hias, tanaman hias, kucing dan anjing. Kita dapat membantu melestarikan keanekaragaman makhluk hidup dengan cara:

- a. tidak membunuh hewan dan tumbuhan liar
- b. tidak memainkan hewan liar dan memetik tumbuhan langka
- c. sewaktu bertamasya atau berkemah, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan, tidak membawa pulang hewan dan tumbuhan langka
- d. tidak membuang sampah di sembarang tempat, karena dapat mengganggu kesehatan hewan jika termakan hewan tersebut
- e. tidak membuang limbah ke lingkungan, misal limbah rumah tangga atau pestisida, karena dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut.

7) Program pengembangan Masyarakat.

Contoh dari program pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1. program pemberian bantuan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum termasuk didalamnya bantuan untuk bencana alam, bantuan prasarana umum termasuk tempat ibadah dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat setempat.
- 2. Program kemitraan adalah menumbuh kembangkan kompetensi di bidang ekonomi dari masyarakat sekitar melalui dukungan pembiayaan lunak pada usaha mikro dan koperasi.
- 3. Program bina lingkungan merupakan wujud komitmen perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Dampak-dampak yang positif dan negatif dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan alam, energy, karyawan, dan masyarakat.

- 1) Dampak positif dari aktivitas bisnis perusahaan
Adanya program bina lingkungan, pelestarian alam-atriaktor cumi dan Pendidikan-bantuan sekolah entrepreneur.
- 2) Dampak negative dari aktivitas bisnis
Proses pengangkutan hasil penambangan di darat dan di laut, ditimbulkan emisi gas dari alat transportasi tersebut.

3. Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah ekologis

- 1) Pengendalian pencemaran air
Di Indonesia sendiri, pengendalian pencemaran air telah diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, pengendalian pencemaran air adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, serta Pemda (Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota). Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 20 yang meliputi 6 ayat yakni:
 1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran
Pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa penetapan daya tampung beban pencemaran ini dilakukan secara berkala, paling sedikit 5 tahun sekali. Kegunaan dari penetapan daya tampung beban pencemaran adalah untuk memberikan izin lokasi, untuk menetapkan rencana tata ruang, untuk memberikan izin membuang air limbah serta untuk menetapkan mutu air, sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
 2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota. Hasil dari identifikasi tersebut lalu dilaporkan kepada Menteri secara berkala, minimal satu tahun sekali. Laporan tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air oleh menteri.
 3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah diatur lebih lanjut pada BAB Persyaratan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah. Dalam bab VI itu disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah harus memiliki izin tertulis dari Bupati/ Walikota. Perizinan tersebut diberikan atas dasar hasil kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

4. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air

Pada pasal 37 disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang membuang limbah ke air atau sumber air harus mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Pada Pasal 38 dijabarkan bahwa persyaratan untuk mendapatkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air harus mencantumkan beberapa hal yakni :

- a) kewajiban mengelola limbah
- b) persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan,
- c) persyaratan cara pembuangan air limbah
- d) persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat,
- e) persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah,
- f) persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan,
- g) larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan,
- h) larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.
- i) kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

5. Memantau kualitas air pada sumber air

Kualitas air pada sumber air dapat diketahui dari ciri- ciri fisis, kimiawi dan biologis air tersebut. Kualitas baik atau buruknya air dapat didasarkan pada data- data yang paling dasar, diantaranya yaitu suhu, tingkat keasaman, banyaknya oksigen di dalam air, warna air, mikroorganisme yang terdapat dalam sumber air dan konduktivitas. Sumber air seharusnya bebas dari pencemaran air. Oleh karena itu pengendalian pencemaran air harus dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang telah dibuat.

6. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air

Selain pencemaran limbah pabrik, faktor lain yang menjadi penyebab turunnya mutu air adalah sampah anorganik, limbah rumah tangga, bencana alam (gunung meletus), aktivitas pertambangan penggunaan bahan peledak, tumpahan minyak, kebocoran pipa gas bawah tanah, limbah nuklir limbah pertanian dan limbah peternakan.

2. Penilaian PROPER

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerapkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (*reuse, reduce, recycle*), efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat di lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Skor	Kriteria	Keterangan
Emas	5	Sangat Baik	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
Hijau	4	Baik	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui 4R (<i>Reduce, Reuse,</i>

			<i>Recycle</i> , dan <i>Recovery</i>) dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dengan baik.
Biru	3	Cukup	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	2	Buruk	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	1	Sangat Buruk	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melalaikan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber : Laporan PROPER No. 5 Tahun 2011

2.1.5. Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure

2.1.5.1. Definisi Disclosure

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) mendefinisikan pengungkapan sebagai berikut: *disclosure means "...supplying*

information in the financial statements themselves, the notes to the statement, and the supplementary disclosure associated with statements. It does not extend to public or private statements by management or information provided outside the financial statement.

Dapat diartikan bahwa “...pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk”.

Hendriksen dan Widjajant (1991:203) dalam Agustine (2014) mendefinisikan pengungkapan (*disclosure*) sebagai “...penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*)”.

Menurut Rinny, (2010) dalam Daniel, (2013), *disclosure* adalah:”...mengkomunikasikan mengenai posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung makna bahwa laporan keuangan harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan (*disclosure*) adalah pengeluaran informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu pelaporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang memadai.

2.1.5.2. Jenis – Jenis *Disclosure*

Jenis pengungkapan menurut Hasudung dan Didin (2008) dalam Daniel (2013), yaitu :

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)
 Pengungkapan wajib adalah pengumpulan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep134/BL/2006 Tanggal : 7 Desember 2006. Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik mensyaratkan elemen-elemen yang seharusnya wajib diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan public di Indonesia harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)
 Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Meskipun semua perusahaan publik diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara sybstantial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.
 Salah satu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan *Corporate Social Responcibility* pada laporan tahunan perusahaan. Aktivitas *corporate social responsibility* dapat di informasikan dan dikomunikasikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* melalui sebuah pengungkapan didalam laporan. Laporan tersebut merupakan salah satu cara untuk melihat seberapa jauh transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan kejujuran yang dimiliki perusahaan. (Muharbiyantp, 2010 dalam Rani, 2013)

2.1.5.3. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Wibisono (2007) mendefinisikan bahwa *corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai “...komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan

serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan”.

ISO 26000 dalam Rusdianto (2013:17) mendefinisikan bahwa: “...tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma- norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa”.

Menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah “...mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum”.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah “...komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Menurut Schermerhorn dalam Suharto (2007:102) bahwa *corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan "...suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal."

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR berorientasi pada tiga hal, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara umum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikatakan sebagai upaya dalam menciptakan hubungan mutualisme sehingga tidak hanya perusahaan yang mendapatkan keuntungan karena tujuan utamanya tercapai yaitu mendapatkan laba, tetapi masyarakat serta lingkungan juga mendapatkan manfaat keberadaan perusahaan, sehingga masyarakat serta lingkungan bersedia menerima keberadaan perusahaan bahkan ikut menjaga terjaminnya keberlanjutan hidup perusahaan dan kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan juga semakin menyadari bahwa keberlangsungan perusahaan tergantung pada hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan perusahaan tersebut berada.

2.1.5.4.Sumber Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Dr.Maria R Nindita Radyati (2014) Sumber Dana CSR dapat berasal dari dua sumber, yaitu :

1. Laba
Jika dana CSR diambil dari laba, maka CSR hanya bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan, karena laba hanya akan dibagikan untuk kegiatan filantropi (seperti donasi, sumbangan, sponsorship, dll).
2. Dana Operasional Perusahaan
Jika CSR diambil dari dana operasional, misalnya untuk membina pemasok agar dapat menghasilkan bahan baku sesuai standar perusahaan, maka manfaat CSR dapat menciptakan dampak jangka panjang. Manfaat lainnya adalah dapat mengurangi pajak.

2.1.5.5.Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tahap aplikasi *Social Responsibility* sebagaimana telah direncanakan sebelumnya (Hadi, 2011:142). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR. Menurut Wibisono (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah komitmen pimpinannya., ukuran atau kematangan perusahaan. Regulasi atau system perpajakan yang diatur pemerintah dan sebagainya. Saidi dan Abidin (dalam Suharto, 2006) mengemukakan bahwa ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan. Yaitu:

1. Keterlibatan langsung
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa adanya perantara. Perusahaan biasanya menunjuk salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary*

atau publik affair manager atau menjadi bagian dari tugas publik relation.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan
Perusahaan mendirikan sebuah yayasan di bawah perusahaan tersebut atau grupnya. Model ini merupakan model yang biasanya diterapkan diberbagai negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, universitas ataupun media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium
Perusahaan ikut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu, model ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga sejenis itu yang dipercaya oleh perusahaan – perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan sedemikian rupa secara sistematis, terstruktur dan periodik, peraturan yang melandasi implementasi CSR perusahaan dijabarkan dalam Undang-Undang RI No.41 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yang telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2007. Pasal 74 UU RI No.40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

1. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban. Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

(Sumber: [http://aria.bapepam.go.id/UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](http://aria.bapepam.go.id/UU%20No.40%20Tahun%202007%20tentang%20Perseroan%20Terbatas), diakses pada 6 April 2015).

2.1.5.6. Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Menurut Gray, dkk (2001) dalam Rakiemah (2009) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah: "...suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial".

Menurut Hackston dan Milne (1996) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah: "...proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan".

Menurut Rahmawati (2012:183) bahwa: "...pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan."

Berdasarkan definisi diatas menunjukan bahwa pengungkapan CSR adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat. Dengan melakukan CSR maka

perusahaan ikut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup di sekitar. Agar masyarakat dapat mengetahui tindakan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka perlu adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan ini tercantum dalam laporan tahunan perusahaan

2.1.5.7. Faktor – Faktor *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Menurut Deegan dalam Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya, yaitu:

1. “Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu”.

2.1.5.8. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

Broadshaw dan Vogel dalam Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan lingkup CSR yaitu:

1. *Corporate Philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat

berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.

2. *Corporate Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

2.1.5.9. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) Disclosure

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam bentuk katup pengaman sosial (social security). Dengan menjelaskan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merk perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)”.

Menurut Rusdianto (2013:13) bahwa: "...keputusan perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek liungkaran emas yang tidak ganya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila CSR mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan".

2.1.5.10 Indikator *Corporate Social Responsibility* (CSR) Disclosure

Corporate Social Responsibility dihitung berdasarkan standar GRI-G4. GRI-G4 menyediakan rerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan, yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya. (Sumber : www.globalreporting.org).

Di dalam GRI menyebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagi standar *disclosure* yang kemudian ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi yaitu: ekonomi, lingkungan, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, masyarakat, hak asasi manusia dan tanggung jawab atas produk. Dari ke-enam

dimensi terdapat 46 konstruk dan total seluruh item pengungkapan menurut GRI G4 adalah 91 item.

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan hal itu perlu diungkapkan dalam annual report. Sebagaimana yang terkandung dalam No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT). Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan 2 (dua) pasal yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan yaitu Pasal 66 ayat 2 tentang Laporan Tahunan dan Pasal 74 Ayat 1 sampai 4 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan sadar akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Melakukan program-program sukarela sehingga pengungkapan lingkungan ataupun sosial menjadi kebutuhan perusahaan untuk tujuan peningkatan reputasi perusahaan.

Tabel 2.3

91 indikator berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan

		pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
-Dampak ekonomi tidak langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
-praktik pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.

	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN5	Intensitas energi.
	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan di pengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.

	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko penunahan.
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1).
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2).
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	NO_{xo} dan SO_x dan emisi udara signifikan lainnya.
-Efluen dan limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis metode dan pembungan.
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, di ekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran dan status lindung, dan keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.

-Produk dan jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori.
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
-Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negative signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.

-Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam

		perjanjian bersama.
-Kesehatan dan keselamatan kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
-Pelatihan dan pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata setahun perkaryawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang

		mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karir secara regular menurut gender dan kategori karyawan.
-Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
-Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.
-Asesmen pemasok terkait praktik ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan

		rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Hak Asasi Manusia		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
-Non diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
-Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk

		mendukung hak-hak tersebut.
-Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
-Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
-Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
-Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen

		dampak hak asasi manusia.
-Asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui pengaduan formal.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori: Masyarakat		
-Masyarakat lokal	SO1	Persentase operasi dengan melibatkan masyarakat lokal, dampak & pengembangan.
	SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
-Anti korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.

	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
-Kebijakan public	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan Negara dan penerima/penerima manfaat.
-Anti persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
-Asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.

-Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori: Tanggungjawab atas produk		
-Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap kepatuhan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
-Pelabelan produk dan jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan

		informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan.
-Komunikasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau yang disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil.
-Privasi pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: www.globalreporting.org

Penjelasan mengenai Indikator *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Disclosure Menurut GRI-G4 adalah:

1. KATEGORI KINERJA EKONOMI

G4-EC1

Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan:
 - a. Pendapatan
2. Nilai ekonomi yang didistribusikan:
 - a. Biaya operasional
 - b. Upah dan tunjangan karyawan
 - c. Pembayaran kepada pemodal
 - d. Pembayaran kepada pemerintah (berdasarkan negara)
 - e. Investasi masyarakat
3. Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung sebagai 'nilai ekonomi langsung yang dihasilkan' dikurangi 'nilai ekonomi yang didistribusikan').

G4-EC2

Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim

1. Laporkan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dimana terdapat potensi untuk menghasilkan perubahan substantive dalam operasional, pendapatan, atau pengeluaran termasuk :
 - a. Uraian risiko atau peluang dan klasifikasi misalnya fisik, peraturan, atau lainnya.
 - b. Uraian tentang dampak terkait dengan risiko atau peluang.
 - c. Implikasi finansial dari risiko atau peluang sebelum tindakan diambil.
 - d. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang.
 - e. Biaya yang timbul dari tindakan-tindakan yang diambil untuk mengelola risiko atau peluang.

G4-EC3

Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti

1. Bila kewajiban-kewajiban yang direncanakan yang dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi, laporan taksiran nilai kewajiban tersebut.
2. Bila terdapat sumber dana terpisah untuk membayar kewajiban rencana pension, laporkan:
 - a. Sejauh mana skema kewajiban-kewajiban tersebut diestimasikan dapat dibayarkan dengan asset yang disisihkan untuk membayarnya.
 - b. Dasar yang dijadikan landasan estimasi tersebut.
 - c. Kapan estimasi tersebut dibuat.
3. Bila dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban rencana tidak sepenuhnya dapat ditanggung, jika ada, jelaskan strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk memastikan agar sepenuhnya dapat ditanggung, dan skala

waktu jika ada, yang diharapkan perusahaan untuk dapat mencapai pertanggungungan penuh.

4. Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan
5. Laporkan tingkat partisipasi pada rencana pension (misalnya partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema berdasarkan negara atau regional, atau skema dengan dampak finansial.)

G4-EC4

Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

1. Laporkan nilai moneter total dari bantuan finansial yang diterima oleh organisasi dari pemerintah selama periode pelaporan, termasuk, setidaknya:
 - a. Keringanan pajak dan kredit pajak
 - b. Subsidi
 - c. Bantuan investasi, bantuan penelitian dan pengembangan, dan jenis bantuan lainnya yang relevan
 - d. Penghargaan
 - e. Pembebasan pembayaran royalty
 - f. Bantuan finansial dari Badan Kredit Ekspor (Export Credit Agencies - ECAs)
 - g. Insentif finansial
 - h. Tunjangan finansial lainnya yang diterima atau dapat diterima dari pemerintah untuk operasi apapun
2. Laporkan informasi di atas berdasarkan negara.
3. Laporkan apakah, dan sejauh mana, pemerintah ada dalam struktur pemegang saham

Aspek: Keberadaan Pasar

G4-EC5

Rasio upah standar pegawai pemula (*entry level*) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan

1. Bila sebagian besar tenaga kerja dibayar berdasarkan upah yang harus mematuhi aturan upah minimum, laporkan rasio upah pegawai pemula (*entry level*) terhadap upah minimum berdasarkan gender di lokasi-lokasi operasi yang signifikan.
2. Laporkan jika aturan upah minimum regional tidak berlaku atau bervariasi di lokasi-lokasi operasi yang signifikan, berdasarkan gender. Dalam keadaan memaksa di mana angka minimum yang berbeda-beda dapat digunakan sebagai acuan, laporkan angka minimum yang digunakan.
3. Laporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

G4-EC6

Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan

1. Laporkan persentase manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan.
2. Laporkan definisi 'manajemen senior' yang digunakan..
3. Laporkan definisi geografis organisasi tentang 'lokal' .

4. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’.

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

G4-EC7

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan

1. Laporkan sejauh mana pembangunan investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan signifikan.
2. Laporkan dampak saat ini atau yang diperkirakan pada masyarakat dan ekonomi lokal. Laporkan dampak positif dan negatif bila relevan.
3. Laporkan apakah investasi dan jasa tersebut merupakan keterlibatan komersial, natura, atau secara cuma-cuma.

G4-EC8

Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak

1. Laporkan contoh dampak ekonomi tidak langsung positif dan negatif signifikan yang teridentifikasi dimiliki organisasi. Hal ini termasuk:
 - a. Yang mengubah produktivitas organisasi, sektor, atau ekonomi secara keseluruhan
 - b. Perkembangan ekonomi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi
 - c. Dampak ekonomi yang timbul dari perbaikan atau kemerosotan keadaan sosial atau lingkungan
 - d. Ketersediaan produk dan jasa bagi mereka yang berpendapatan rendah
 - e. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pada kelompok profesional tertentu atau di daerah geografis tertentu.
 - f. Pekerjaan yang tersedia dalam rantai pasokan atau rantai distribusi
 - g. Menstimulasi, memampukan, atau membatasi investasi asing langsung
 - h. Dampak ekonomi dari perubahan lokasi operasional atau kegiatan
 - i. Dampak ekonomi dari penggunaan produk dan jasa
2. Laporkan tingkat signifikansi dampak dalam konteks tolok ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan, seperti standar nasional dan internasional, protokol, serta agenda kebijakan.

Aspek: Praktik Pengadaan

G4-EC9

Perbandingan pembelian dari pemasok lokasi di lokasi operasional yang signifikan

1. Laporkan persentase anggaran pengadaan yang digunakan di lokasi operasi yang signifikan yang dibelanjakan pada pemasok lokal pada operasi yang dimaksud (seperti persentase produk dan jasa yang dibeli secara lokal).
2. Laporkan definisi geografis organisasi tentang ‘lokal’.
3. Laporkan definisi yang digunakan untuk ‘lokasi operasi yang signifikan’

2. KATEGORI : LINGKUNGAN

Aspek: Bahan

G4-EN1

Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume

Laporkan berat atau volume total bahan yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan, berdasarkan:

1. Bahan tak terbarukan yang digunakan
2. Bahan terbarukan yang digunakan

G4-EN2

Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang. Laporkan persentase bahan input berupa bahan dasar daur ulang yang digunakan untuk pembuatan produk dan jasa utama perusahaan.

Aspek: Energi

G4-EN3

Konsumsi energi dalam organisasi

1. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber yang tak terbarukan dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan.
2. Laporkan konsumsi total bahan bakar dari sumber bahan bakar terbarukan dalam satuan joule atau kelipatannya, termasuk jenis bahan bakar yang digunakan.
3. Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari:
 - a. Konsumsi listrik
 - b. Konsumsi pemanas
 - c. Konsumsi pendingin
 - d. Konsumsi uap
4. Laporkan dalam satuan joule, watt jam atau kelipatannya, total dari:
 - a. Listrik yang dijual
 - b. Pemanas yang dijual
 - c. Pendingin yang dijual
 - d. Uap yang dijual
5. Laporkan konsumsi energi total dalam satuan joule atau kelipatannya.
6. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.
7. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan.

G4-EN4

Konsumsi energi di luar organisasi

1. Laporkan energi yang dikonsumsi di luar organisasi, dalam satuan joule atau kelipatannya
2. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan
3. Laporkan sumber faktor konversi yang digunakan.

G4-EN5

Intensitas energi

1. Laporkan rasio intensitas energi.
2. Laporkan metrik yang spesifik organisasi (penyebut rasio) yang dipilih untuk menghitung rasio tersebut.

3. Laporkan jenis energi yang dicakup dalam rasio intensitas: bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, uap, atau seluruhnya.
4. Laporkan apakah rasio memperhitungkan energi yang dikonsumsi di dalam organisasi, di luar organisasi, Atau keduanya.

G4-EN6

Pengurangan konsumsi energi

1. Laporkan jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai yang merupakan hasil langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi, dalam satuan joule atau kelipatannya.
2. Laporkan jenis energi yang termasuk dalam pengurangan: bahan bakar, listrik, pemanas, pendingin, dan uap.
3. Laporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya.
4. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

G4-EN7

Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa

1. Laporkan pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa yang dijual, yang dicapai selama periode pelaporan, dalam satuan joule atau kelipatannya.
2. Laporkan dasar untuk penghitungan pengurangan konsumsi energi misalnya tahun dasar atau garis dasar, dan alasan pemilihannya.
3. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

Aspek: Air

G4-EN8

Total pengambilan air berdasarkan sumber

1. Laporkan total volume pengambilan air dari sumber berikut ini:
 - a. Air permukaan, termasuk air dari rawa, sungai, danau, dan laut
 - b. Air tanah
 - c. Air hujan yang dikumpulkan secara langsung dan disimpan oleh organisasi
 - d. Air limbah dari organisasi lain
 - e. Pasokan air kota atau perusahaan air lainnya
2. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

G4-EN9

Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air

1. Laporkan jumlah total sumber air yang secara signifikan terkena dampak pengambilan air berdasarkan jenis:
 - a. Ukuran sumber air
 - b. Apakah sumber tersebut merupakan kawasan lindung (secara nasional atau internasional) atau tidak.
 - c. Nilai keanekaragaman hayati (seperti keragaman spesies dan endemik, jumlah spesies yang dilindungi)

- d. Nilai atau pentingnya sumber air terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat.
2. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

G4-EN10

Persentase dan total volume air yang di daur ulang dan digunakan kembali

1. Laporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali oleh organisasi.
2. Laporkan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali dalam persentase total pengambilan air yang dilaporkan dalam Indikator G4-EN8.
3. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

Aspek: Keanekaragaman hayati

G4-EN11

Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung

1. Laporkan informasi berikut untuk setiap lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung:
 - a. Lokasi geografis
 - b. Lahan di bawah permukaan dan bawah tanah yang mungkin dimiliki, disewa, atau dikelola oleh Organisasi.
 - c. Posisi dalam hubungannya dengan kawasan lindung (di dalam, berdekatan dengan, atau terdapat bagian dari kawasan lindung) atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
 - d. Jenis operasi (kantor, pabrik atau produksi, atau pertambangan)
 - e. Ukuran lokasi operasional dalam satuan km
 - f. Nilai keanekaragaman hayati dicirikan berdasarkan:
 - 1) Atribut kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan lindung (ekosistem darat, air tawar, atau laut)
 - 2) Penetapan status perlindungan (seperti IUCN Protected Area Management Categories 67, Konvensi Ramsar peraturan nasional).

G4-EN12

Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman Hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi luar kawasan lindung

1. Laporkan sifat dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada keanekaragaman hayati yang dikaitkan pada satu atau beberapa dari hal berikut ini:
 - a. Pembangunan atau penggunaan pabrik produksi, tambang, dan infrastruktur transportasi
 - b. Polusi (masuknya zat-zat yang tidak secara alamiah terjadi dalam habitat dari titik tertentu dan non-titik)

- c. Masuknya spesies pengganggu, hama, dan wabah penyakit
- d. Berkurangnya spesies
- e. Perubahan habitat
- f. Perubahan proses ekologis di luar jangkauan variasi alam (seperti salinitas atau perubahan tinggi air tanah)
- 2. Laporkan dampak positif dan negatif, langsung dan tidak langsung, yang signifikan dengan referensi sebagai berikut:
 - a. Spesies yang terkena dampak
 - b. Luasan kawasan terkena dampak
 - c. Durasi dampak
 - d. Keterpulihan atau ketidakpulihan dampak

G4-EN13

Habitat yang dilindungi dan dipulihkan

1. Laporkan ukuran dan lokasi semua kawasan habitat yang dilindungi atau kawasan yang dipulihkan, dan apakah keberhasilan tindakan pemulihan telah atau disetujui oleh ahli independen eksternal.
2. Laporkan apakah ada kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau memulihkan kawasan habitat yang berbeda dari lokasi yang diawasi organisasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemulihan dan perlindungan.
3. Laporkan status dari setiap kawasan berdasarkan kondisinya pada penutupan periode pelaporan.
4. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

G4-EN14

Jumlah total spesies dalam *iucn red list* dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan

1. Laporkan jumlah spesies IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di wilayah yang dipengaruhi oleh operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan:
 - a. Kritis (*critically endangered*)
 - b. Genting (*endangered*)
 - c. Rentan (*vulnerable*)
 - d. Hampir terancam (*near threatened*)
 - e. Berisiko rendah (*least concern*)

Aspek: Emisi

G4-EN15

Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)

1. Laporkan emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1) dalam satuan metrik ton setara CO₂, tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan *offset* atau pertukaran.
2. Laporkan gas yang diperhitungkan dalam kalkulasi (CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃ atau seluruhnya).

3. Laporan emisi CO₂biogenik dalam satuan metrik ton setara CO₂terpisah dari emisi bruto GRK langsung (Cakupan 1).
4. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar
5. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan
6. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP
7. Laporkan pendekatan pengkonsolidasian yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol finansial, kontrol operasional).

G4-EN16

Emisi gas rumah kaca (grk) energi tidak langsung (cakupan 2)

1. Laporkan emisi GRK tidak langsung (Cakupan 2) dari energi bruto dalam satuan metrik ton setara CO₂, tidak termasuk dari perdagangan GRK, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran.
2. Laporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia.
3. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar.
4. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.
5. Laporkan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia
6. Laporkan pendekatan konsolidasi yang dipilih untuk emisi (porsi saham, kontrol finansial, kontrol operasional)

G4-EN17

Emisi gas rumah kaca (grk) tidak langsung lainnya (cakupan 3)

1. Laporkan emisi bruto GRK tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dalam satuan metrik ton setara CO₂, tidak termasuk emisi tidak langsung dari dihasilkan dari listrik, pemanas, pendingin, dan uap yang dibeli atau diperoleh yang digunakan perusahaan (emisi tidak langsung ini dilaporkan dalam Indikator G4-EN16). Kecualikan perdagangan GRK apa pun, seperti pembelian, penjualan, atau pengalihan offset atau pertukaran.
2. Laporkan gas-gas yang disertakan dalam penghitungan, jika tersedia.
3. Laporan emisi CO₂biogenik dalam satuan metrik ton setara CO₂terpisah dari emisi GRK bruto tidak langsung (Cakupan 3) lainnya.
4. Laporkan kategori emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3) dan aktivitas yang diperhitungkan dalam kalkulasi.
5. Laporkan tahun dasar yang dipilih, alasan pemilihan tahun dasar tersebut, emisi pada tahun dasar, dan konteks untuk perubahan apa pun yang signifikan pada emisi yang mengakibatkan kalkulasi ulang pada emisi tahun dasar.
6. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

7. Laporkan acuan sumber faktor emisi yang digunakan dan tingkat potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP, jika tersedia.

G4-EN18

Intensitas emisi gas rumah kaca (grk)

1. Laporkan rasio intensitas emisi GRK.
2. Laporkan metrik khusus organisasi (rasio penyebut) yang dipilih untuk menghitung rasio tersebut.
3. Laporkan jenis emisi GRK yang termasuk dalam rasio intensitas: langsung (Cakupan 1), energi tidak langsung (Cakupan 2), tidak langsung lainnya (Cakupan 3).
4. Laporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan.

G4-EN19

Pengurangan emisi gas rumah kaca (grk)

1. Laporkan jumlah pengurangan emisi GRK yang dicapai sebagai hasil langsung inisiatif pengurangan emisi, dalam satuan metrik ton setara CO₂.
2. Laporkan gas-gas yang termasuk dalam penghitungan (CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆, NF₃, atau seluruhnya).
3. Laporkan tahun dasar atau garis dasar yang dipilih serta alasan pemilihannya.
4. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.
5. Laporkan apakah pengurangan emisi GRK terjadi dalam emisi langsung (Cakupan 1), emisi energi tidak langsung (Cakupan 2), emisi tidak langsung lainnya (Cakupan 3).

G4-EN20

Emisi bahan perusak ozon (bpo)

1. Laporkan produksi, impor, dan ekspor bahan perusak ozon (BPO) dalam satuan metrik ton setara CFC-11.
2. Laporkan bahan-bahan yang termasuk dalam penghitungan.
3. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.
4. Laporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan.

G4-EN21

NO_x, sox, dan emisi udara signifikan lainnya

1. Laporkan jumlah emisi udara yang signifikan, dalam satuan kilogram atau kelipatannya untuk setiap hal berikut:
 - a. NO_x
 - b. SO_x
 - c. Pencemar organik persisten (POP)
 - d. Senyawa organik volatil (VOC)
 - e. Pencemar udara berbahaya (HAP)
 - f. Debu (PM)
 - g. Kategori emisi udara standar lainnya yang diidentifikasi dalam peraturan yang relevan

2. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.
3. Laporkan sumber acuan faktor emisi yang digunakan

Aspek: Efluen dan limbah

G4-EN22

Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan

1. Laporkan volume total air terencana dan tidak terencana yang dibuang berdasarkan:
 - a. Tujuan
 - b. Kualitas air termasuk metode penanganan
 - c. Apakah digunakan kembali oleh organisasi lain atau tidak
2. Laporkan standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan.

G4-EN23

Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan

1. Laporkan bobot total limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dengan metode pembuangan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan kembali
 - b. Daur ulang
 - c. Pengompasan
 - d. Pemulihan, termasuk pemulihan energi
 - e. Pembakaran (pembakaran massa)
 - f. Injeksi sumur dalam
 - g. Tempat pembuangan akhir (TPA)
 - h. Penyimpanan di tempat Lainnya (ditentukan oleh organisasi)
2. Laporkan bagaimana metode pembuangan limbah ditentukan:
 - a. Dibuang langsung oleh organisasi atau jika tidak, dikonfirmasi secara langsung.
 - b. Informasi yang diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah
 - c. Standar organisasi untuk kontraktor pembuangan limbah

G4-EN24

Jumlah dan volume total tumpahan signifikan

1. Laporkan jumlah dan volume total tumpahan signifikan yang tercatat.
2. Untuk tumpahan yang dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi, laporkan informasi tambahan berikut untuk setiap kejadian tumpahan tersebut:
 - a. Lokasi tumpahan
 - b. Volume tumpahan
 - c. Bahan yang tumpah, dikategorikan menurut:
 - 1) Tumpahan minyak (permukaan tanah atau air)
 - 2) Tumpahan bahan bakar (permukaan tanah atau air)
 - 3) Tumpahan limbah (permukaan tanah atau air)
 - 4) Tumpahan zat kimia (sebagian besar permukaan tanah atau air)
 - 5) Lainnya (ditentukan oleh organisasi)
3. Laporkan dampak tumpahan yang signifikan

G4-EN25

Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran i, ii, iii, dan viii yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional

1. Laporkan bobot total untuk tiap-tiap hal berikut ini:
 - a. Limbah berbahaya yang diangkut
 - b. Limbah berbahaya yang diimpor
 - c. Limbah berbahaya yang diekspor
 - d. Limbah berbahaya yang diolah
2. Laporkan persentase limbah berbahaya yang dikirimkan internasional.

G4-EN26

Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi

1. Laporkan badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak air buangan berdasarkan kriteria yang dijelaskan pada bagian Penyusunan di bawah ini, dengan menambahkan informasi tentang:
 - a. Ukuran badan air dan habitat terkait
 - b. Apakah badan air dan habitat terkait merupakan sebagai kawasan lindung (secara nasional atau internasional) atau tidak
 - c. Nilai keanekaragaman hayati (seperti jumlah total spesies yang dilindungi)

Aspek: Produk dan Jasa

G4-EN27

Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa

1. Laporkan secara kuantitatif sejauh mana dampak lingkungan dari produk dan jasa yang telah dimitigasi selama periode pelaporan.
2. Jika menggunakan angka-angka yang dikaitkan pada penggunaan, laporkan asumsi dasar yang dipakai terkait pola konsumsi atau faktor normalisasi.

G4-EN28

Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori

1. Laporkan persentase produk dan bahan kemasannya yang direklamasi untuk setiap kategori produk.
2. Laporkan bagaimana data untuk Indikator ini diperoleh.

Aspek: Kepatuhan

G4-EN29

Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan

1. Laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dalam bentuk:
 - a. Nilai moneter total dari denda yang signifikan
 - b. Jumlah total sanksi non-moneter
 - c. Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa

2. Bila organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

Aspek: Transportasi

G4-EN30

Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta Bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja

1. Laporkan dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja. Jika data kuantitatif tidak diberikan, laporkan alasannya.
2. Laporkan bagaimana dampak lingkungan dari pengangkutan produk, tenaga kerja organisasi, dan barang serta bahan lainnya dikurangi.
3. Laporkan kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menentukan mana dampak lingkungan yang signifikan.

Aspek: Lain-lain

G4-EN31

Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis

1. Laporkan total pengeluaran perlindungan lingkungan berdasarkan:
 - a. Biaya pembuangan limbah, pengolahan emisi, dan remediasi
 - b. Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan

Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan

G4-EN32

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan

Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.

G4-EN33

Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan Dan tindakan yang diambil

1. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak lingkungan.
2. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan.
3. Laporkan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial yang teridentifikasi pada rantai pasokan.
4. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.
5. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap lingkungan yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

G4-EN34

Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan Diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

1. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan.
2. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang:
3. Ditangani selama periode pelaporan Diselesaikan selama periode pelaporan
4. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan

3. KATEGORI: SOSIAL

Aspek: Kepegawaian

G4-LA1

Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan Menurut kelompok umur, gender, dan wilayah

1. Laporkan jumlah total dan tingkat rekrut karyawan baru selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender, dan wilayah.
2. Laporkan jumlah total dan tingkat turnover karyawan selama periode pelaporan, menurut kelompok usia, gender, dan wilayah.

G4-LA2

Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi Karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan

1. Laporkan tunjangan yang merupakan standar untuk karyawan purna waktu dari organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh-waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan. Hal ini mencakup, setidaknya:
 - a. Asuransi jiwa
 - b. Asuransi kesehatan
 - c. Perlindungan kecacatan dan ketidakmampuan
 - d. Cuti melahirkan
 - e. Pemberian pension
 - f. Kepemilikan saham
 - g. Lainnya
2. Laporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

G4-LA3

Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut Gender

1. Laporkan jumlah total karyawan yang berhak mendapatkan cuti melahirkan, menurut gender.
2. Laporkan jumlah total karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender.
3. Laporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, menurut gender.

4. Laporkan jumlah total karyawan yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir yang masih dipekerjakan dua belas bulan setelah mereka kembali bekerja, menurut gender.
5. Laporkan tingkat karyawan yang kembali bekerja dan tingkat retensi karyawan yang mengambil cuti melahirkan, menurut gender

Aspek: Hubungan Industrial

G4-LA4

Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional,, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama

1. Laporkan berapa minggu waktu minimum yang biasanya diberikan untuk pemberitahuan perubahan kepada karyawan dan perwakilan terpilih sebelum penerapan perubahan operasional signifikan yang dapat memengaruhi mereka secara substansial.
2. Untuk organisasi dengan perjanjian kerja bersama, laporkan apakah masa pemberitahuan dan ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi telah dicantumkan dalam perjanjian bersama.

Aspek: Kesehatan dan keselamatan kerja

G4-LA5

Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal

Manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program Kesehatan dan keselamatan kerja

1. Laporkan pada tingkat mana setiap komite bersama formal manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan biasanya berjalan dalam organisasi.
2. Laporkan persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja kesehatan dan keselamatan

G4-LA6

Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta

Jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender

1. Laporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk total tenaga kerja (yaitu, jumlah karyawan ditambah pengawas/mandor), berdasarkan:
 - a. Wilayah
 - b. Gender
2. Laporkan jenis cedera, tingkat cedera (IR), tingkat penyakit akibat kerja (ODR), tingkat hari hilang (LDR), tingkat mangkir (AR), dan kematian akibat kerja, untuk kontraktor independen yang bekerja di lokasi kerja yang keselamatan kerjanya menjadi tanggung jawab organisasi, berdasarkan:
 - a. Wilayah
 - b. Gender

3. Laporkan sistem aturan yang diterapkan dalam pencatatan dan pelaporan statistik kecelakaan

G4-LA7

Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait Dengan pekerjaan mereka

1. Laporkan apakah ada pekerja yang dalam kegiatan kerja yang sering terkena, atau berisiko tinggi terkena, penyakit tertentu.

G4-LA8

Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan Serikat pekerja

1. Laporkan apakah perjanjian formal (baik lokal atau global) dengan serikat pekerja mencakup kesehatan dan keselamatan.
2. Jika ya, laporkan sejauh mana, dalam persentase, berbagai topik kesehatan dan keselamatan dicakup oleh perjanjian ini

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan

G4-LA9

Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut Kategori karyawan

1. Laporkan jam pelatihan rata-rata yang telah diambil oleh karyawan organisasi selama periode pelaporan, menurut:
 - a. Gender
 - b. Kategori karyawan

G4-LA10

Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang Mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna Bakti

1. Laporkan jenis dan cakupan program yang dilaksanakan dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan.
2. Laporkan program bantuan transisi yang diberikan untuk memfasilitasi keberlanjutan kerja dan pengelolaan purna bakti akibat pensiun atau pemutusan hubungan kerja

G4-LA11

Persentase karyawan yang menerima *review* kinerja dan pengembangan karier secara Reguler, menurut gender dan kategori karyawan

1. Laporkan persentase karyawan total berdasarkan gender dan berdasarkan kategori karyawan yang mendapat *review* kinerja rutin dan pengembangan karir selama periode pelaporan.

Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang

G4-LA12

Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan

Menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya

1. Laporkan persentase individu-individu dalam badan tata kelola organisasi di setiap kategori keanekaragaman berikut:
 - a. Gender
 - b. Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun
 - c. Kelompok minoritas
 - d. Indikator keberagaman lainnya bila relevan
2. Laporkan persentase karyawan per kategori karyawan di setiap kategori keberagaman berikut:
 - a. Gender
 - b. Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 tahun, di atas 50 tahun
 - c. Kelompok minoritas
 - d. Indikator keberagaman lainnya bila relevan

Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki

G4-LA13

Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut Kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan

1. Laporkan rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki untuk setiap kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
2. Laporkan definisi yang digunakan untuk 'lokasi operasi yang signifikan'.

Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan

G4-LA14

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan

1. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.

G4-LA15

Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik Ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

1. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak untuk praktik ketenagakerjaan.
2. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan
3. Laporkan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang diidentifikasi pada rantai pasokan.
4. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.
5. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan untuk praktik ketenagakerjaan yang

diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

G4-LA16

Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan Diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.

1. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan.
2. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang:
 - a. Ditangani selama periode pelaporan
 - b. Diselesaikan selama periode pelaporan
3. Laporkan jumlah total pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

4. KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA

Aspek: Investasi

G4-HR1

Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang Menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak Asasi manusia

1. Laporkan jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
2. Laporkan definisi 'perjanjian investasi yang signifikan' yang digunakan oleh organisasi.

G4-HR2

Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi Manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, Termasuk persentase karyawan yang dilatih

1. Laporkan jumlah total waktu dalam periode pelaporan yang digunakan untuk pelatihan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasional.
2. Laporkan persentase karyawan dalam periode pelaporan yang dilatih mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur yang terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi.

Aspek: Non-diskriminasi

G4-HR3

Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil

1. Laporkan jumlah total insiden diskriminasi selama periode pelaporan.
2. Laporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada hal-hal berikut:

- a. Insiden yang ditinjau oleh organisasi
- b. Rencana remediasi yang sedang diterapkan
- c. Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses *review* manajemen rutin
- d. Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindak

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama

G4-HR4

Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi Melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja Bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut

1. Laporkan operasi dan pemasok di mana hak karyawan untuk menjalankan kebebasan berserikat atau perjanjian kerja bersama mungkin dilanggar atau berisiko tinggi untuk dilanggar baik dalam hal:
 - a. Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok
 - b. Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko
2. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama

Aspek: Pekerja Anak

G4-HR5

Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi Pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan Pekerja anak yang efektif

1. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko besar atas terjadinya eksploitasi:
 - a. Pekerja anak
 - b. Pekerja muda yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang berbahaya
2. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja anak baik dalam hal:
 - a. Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok
 - b. Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko
3. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.

Aspek: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja

G4-HR6

Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa Atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala Bentuk pekerja paksa atau wajib kerja

1. Laporkan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko tinggi atas terjadinya eksploitasi pekerja paksa atau wajib kerja baik dalam hal:
 - a. Jenis operasi (seperti pabrik produksi) dan pemasok
 - b. Negara atau area geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko
2. Laporkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam periode pelaporan yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam penghapusan semua bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.

Aspek: Praktik Pengamanan

G4-HR7

Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak Asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi

1. Laporkan persentase petugas pengamanan yang telah menerima pelatihan formal mengenai kebijakan hak asasi manusia atau prosedur tertentu di organisasi dan penerapannya pada pengamanan.
2. Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas pengamanan.

Aspek: Hak Adat

G4-HR8

Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan Tindakan yang diambil

1. Laporkan jumlah total insiden pelanggaran yang diidentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan.
2. Laporkan status insiden dan tindakan yang diambil dengan merujuk pada:
 - a. Insiden yang ditinjau oleh organisasi
 - b. Rencana remediasi yang sedang diterapkan
 - c. Rencana remediasi telah diterapkan dan hasilnya telah ditinjau melalui proses revidi manajemen rutin
 - d. Insiden yang bukan merupakan hal untuk ditindas

G4-HR9

Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan revidi atau asesmen Dampak hak asasi manusia

1. Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang merupakan subyek untuk dilakukan revidi atau asesmen dampak hak asasi manusia, berdasarkan negara.

Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia

G4-HR10

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia

1. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.

G4-HR11

Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia

Dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

1. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen terkait dampak hak asasi manusia.
2. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak yang benar-benar negatif dan potensi dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia.
3. Laporkan dampak negatif aktual dan potensial hak asasi manusia signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan.
4. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.
5. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak hak asasi manusia negatif signifikan aktual dan potensial yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya

Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia

G4-HR12

Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, Ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal

1. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan melalui mekanisme pengaduan formal selama periode pelaporan.
2. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang:
 - a. Ditangani selama periode pelaporan
 - b. Diselesaikan selama periode pelaporan
3. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak hak asasi manusia yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

Aspek: Masyarakat Lokal

G4-SO1

Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan Program pengembangan yang diterapkan

1. Laporkan persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan, termasuk penggunaan:
 - a. Asesmen dampak sosial, termasuk asesmen dampak gender, berdasarkan pada proses partisipasi
 - b. Asesmen dampak lingkungan dan pemantauan berkelanjutan
 - c. Pengungkapan publik atas hasil asesmen dampak lingkungan dan sosial
 - d. Program pengembangan masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal
 - e. Rencana pelibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan
 - f. Komite konsultasi masyarakat lokal berbasis luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan

- g. Dewan kerja, komite kesehatan dan keselamatan kerja, dan badan perwakilan karyawan lainnya untuk menangani dampak
- h. Proses pengaduan formal masyarakat lokal

G4-SO2

Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap Masyarakat lokal

1. Laporkan operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk:
 - a. Lokasi operasi
 - b. Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan dari operasi

Aspek: Anti-korupsi

G4-SO3

Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan Korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi

1. Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang dinilai untuk risiko terkait dengan korupsi.
2. Laporkan risiko yang signifikan terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui asesmen risiko.

G4-SO4

Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi

1. Laporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut wilayah.
2. Laporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah.
3. Laporkan jumlah total dan persentase mitra bisnis yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi organisasi, yang dikelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan wilayah.
4. Laporkan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah menerima pelatihan mengenai anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut wilayah.
5. Laporkan jumlah total dan persentase karyawan yang telah menerima pelatihan mengenai anti-korupsi, yang dikelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah.

G4-SO5

Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

1. Laporkan jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti.
2. Laporkan jumlah total insiden terbukti di mana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi.
3. Laporkan jumlah total insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis yang diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi.

4. Laporkan kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut.

Aspek: Kebijakan Publik

G4-SO6

Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat

1. Laporkan total nilai moneter dari kontribusi politik secara finansial dan non-finansial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh organisasi menurut negara dan penerima/penerima manfaat.
2. Laporkan cara memperkirakan nilai finansial dari kontribusi non-finansial, jika ada.

Aspek: Anti Persaingan

G4-SO7

Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik Monopoli dan hasilnya

1. Laporkan jumlah total tindakan hukum yang tertunda atau diselesaikan selama periode pelaporan terkait dengan anti persaingan dan pelanggaran undang-undang anti-trust dan monopoli yang organisasi teridentifikasi ikut serta.
2. Laporkan hasil utama dari tindakan hukum yang diselesaikan, termasuk setiap keputusan atau pertimbangan.

Aspek: Kepatuhan

G4-SO8

Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan

1. Laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan dari segi:
 - a. Nilai moneter total dari denda yang signifikan
 - b. Jumlah total sanksi non-moneter
 - c. Kasus yang diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa
2. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.
3. Laporkan konteks atas denda dan sanksi non-moneter yang signifikan yang terjadi.

Aspek: Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat

G4-SO9

Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat

1. Laporkan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat.

G4-SO10

Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam Rantai pasokan dan tindakan yang diambil

1. Laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen untuk dampak terhadap masyarakat.
2. Laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat.
3. Laporkan dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang diidentifikasi pada rantai pasokan.
4. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan.
5. Laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap masyarakat yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, beserta alasannya.

Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat

G4-SO11

Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, Dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

1. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan.
2. Dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang:
 - a. Ditangani selama periode pelaporan
 - b. Diselesaikan selama periode pelaporan
3. Laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak pada masyarakat yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan.

5. KATEGORI: TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

G4-PR1

Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap Kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan

1. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampak kesehatan dan keselamatannya Telah dinilai untuk ditingkatkan.

G4-PR2

Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait Dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, Menurut jenis hasil

1. Laporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan, menurut:
 - a. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalty

- b. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian peringatan
- c. Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela
- 2. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, Pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup

Aspek: Pelabelan Produk dan Jasa

G4-PR3

Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait Dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk Dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis

- 1. Laporkan apakah informasi produk dan jasa berikut diharuskan berdasarkan prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa:
- 2. Laporkan persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dicakup oleh dan dinilai berdasarkan

G4-PR4

Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait Dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil

- 1. Identifikasi jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut:
 - a. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalty
 - b. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan peringatan
 - c. Insiden ketidakpatuhan terhadap koda sukarela
- 2. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

G4-PR5

Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan

- 1. Laporkan hasil atau kesimpulan utama dari survei kepuasan pelanggan (berdasarkan ukuran sampel yang relevan secara statistik) yang dilakukan dalam periode pelaporan terkait dengan informasi tentang:
 - a. Organisasi secara keseluruhan
 - b. Kategori produk atau jasa utama
 - c. Lokasi operasi yang signifikan

Aspek: Komunikasi Pemasaran

G4-PR6

Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan

- 1. Laporkan apakah organisasi menjual produk yang:
 - a. Dilarang di pasar tertentu
 - b. Menjadi subjek dari pertanyaan pemangku kepentingan atau debat public
- 2. Laporkan cara organisasi menjawab pertanyaan atau kekhawatiran mengenai produk tersebut.

G4-PR7

Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela Tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis Hasil

1. Laporkan jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut:
 - a. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan denda atau penalty
 - b. Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan pemberian peringatan
 - c. Insiden ketidakpatuhan terhadap aturan sukarela
2. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap peraturan dan koda sukarela, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

Aspek: Privasi Pelanggan

G4-PR8

Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan Dan hilangnya data pelanggan

1. Laporkan jumlah total keluhan yang terbukti yang diterima tentang pelanggaran privasi pelanggan, yang dikategorikan menurut:
 - a. Keluhan yang diterima dari pihak luar dan terbukti terkait dengan organisasi
 - b. Keluhan dari badan regulator
2. Laporkan jumlah total kebocoran, pencurian, atau hilangnya data pelanggan yang teridentifikasi.
3. Jika organisasi tidak mengidentifikasi keluhan yang terbukti, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup.

Aspek: Kepatuhan

G4-PR9

Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang Dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

1. Laporkan total nilai moneter dari denda yang signifikan untuk ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.
2. Jika organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apa pun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup

Item-item *corporate social responsibility* (CSR) *disclosure* tersebut diukur dengan menggunakan CSR Index, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan rumus sebagai berikut:

$$CSR I_j = \frac{X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSR I_j$: *Corporate Social Responsibility Index* Perusahaan j

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

X_{ij} : jumlah *item* pengungkapan CSR yang terpenuhi

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Definisi Laba

Setiap perusahaan menginginkan laba atau sering disebut juga dengan keuntungan atau (*profit*). Laba diperlukan perusahaan untuk dapat terus bertahan dalam perekonomian dan melangsungkan kehidupan perusahaan tersebut.

Dwi Martani (2012:113) menyatakan bahwa pengertian laba adalah: “...laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode”.

Menurut Hendriksen and Van Breda (2000:319) yang dialihbahasakan oleh Nugroho (2006:331) menyatakan bahwa: "...laba merupakan surplus sesudah pemeliharaan kesejahteraan".

Menurut Sadono Sukirno (2010:240), laba adalah: "...selisih antara penerimaan perusahaan dari penjualan produksi dengan biaya produksi, yang jumlah hasil penjualannya melebihi semua biaya"

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa laba adalah perkiraan atas kenaikan (penurunan) ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal yang diakibatkan karena adanya kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk pemasukan (pendapatan lebih besar dari beban) atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban.

2.1.6.2 Jenis – Jenis Laba

Menurut Kasmir (2016: 303), dalam praktiknya laba terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Laba kotor (*gross profit*)
Laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*)
Laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

2.1.6.3 Karakteristik Laba

Menurut Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2012: 229), terdapat lima karakteristik yang terdapat dalam laba akuntansi, yaitu:

1. “Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh perusahaan (terutama laba yang muncul dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan penjualan tersebut).
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periode yang mengacu pada kinerja keuangan dari perusahaan selama periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan.
4. Laba akuntansi meminta adanya pengukuran beban-beban dari segi biaya historisnya terhadap perusahaan, yang menunjukkan kekuatan yang tinggi pada prinsip biaya.
5. Laba akuntansi meminta penghasilan yang terealisasi di periode tersebut dihubungkan dengan biaya-biaya yang relevan”.

2.1.6.4 Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Menurut Suwardjono (2014:456), informasi tentang laba perusahaan diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai:

1. “indikator efisiensi penggunaan dan tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau investasi (rate of return on invested capital)
2. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
4. Alat pengendalian alokasi sumber data ekonomik suatu negara.
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan public.
6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak uang.
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
9. Dasar pembagian deviden”.

2.1.6.5 Definisi aktiva

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:19) bahwa aset adalah “...sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”.

Menurut Kieso dan Weygant (2008:40) menjelaskan aktiva adalah “...manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau kewajiban-kewajiban masa”.

Menurut Kasmir (2016:39), aktiva adalah : “...harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang.

2.1.6.6 Jenis - Jenis Aktiva

Jenis-jenis aktiva menurut Kasmir (2016:39), yaitu:

1. “Aktiva lancar

Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunai) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling *liquid* dari aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang untuk membayar sesuatu yang segera harus dibayar misalnya utang yang sudah jatuh tempo, atau pembelian suatu barang atau jasa, uang tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, sewa dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya. Penyusutan aktiva lancar ini biasanya dimulai

dari aktiva yang paling lancar, artinya yang paling mudah untuk dicairkan.

2. Aktiva tetap

Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik), seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh: hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.

3. Aktiva lainnya

Aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen yang ada dalam aktiva lainnya adalah seperti: bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian dan lainnya”.

2.1.6.7 Definisi Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2016:81) bahwa profitabilitas adalah “...kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu”.

Menurut Kasmir (2016:196), bahwa: “...rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi”.

Menurut Brigham dan Houston (2006:107), profitabilitas adalah sebagai berikut profitabilitas adalah “...hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan

keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan”.

Dari berbagai jenis definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

2.1.6.8 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:197-198), Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

2.1.6.9 Jenis – Jenis Profitabilitas

Menurut Kasmir (2008:199), rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 jenis yakni , *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Earning per share* (EPS). Selain keempat jenis rasio profitabilitas di atas terdapat konsep baru untuk mengukur kinerja keuangan yakni *Economic Value Added* (EVA) dan *Market Value Added* (MVA) yang dicetuskan oleh Stern dan Stewart.

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

GPM menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. GPM merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka GPM akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio GPM, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya, semakin rendah GPM, semakin kurang baik operasi perusahaan. Rumus perhitungan GPM adalah sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return on Asset (ROA)*

Return on asset adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva, atau dapat dikatakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dan semakin baik posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Begitu juga sebaliknya bila ROA kecil maka tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan akan kecil dan posisi perusahaan akan kurang baik.

Menurut Mamduh Hanafi (2008:42), pengertian ROA adalah: “...mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu”.

Menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2010:148), pengertian ROA adalah: “...rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset”.

Selanjutnya menurut Sutrisno (2008:222) pengertian *Return on Asset (ROA)* adalah: “...ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan”.

Menurut Dendrawijaya (2003) dalam Anggun Amelia Bahar Putri (2012:20), semakin besar ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Sebaliknya, rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ROA dijabarkan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

3. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Mamduh M.Hanafi (2008:42), “...*return on equity* (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham”.

Menurut Harahap (2007:156) menyatakan bahwa: "...return on equity digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham". Angka tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE semakin besar pula harga pasar karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal ini menyebabkan harga pasar saham cenderung naik".

Return on Equity merupakan rasio yang sangat diminati oleh para investor, karena ROE merupakan indikator mengenai laba bagi para pemegang saham, karena semakin tinggi ROE maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh laba, dan tingkat pengembalian akan semakin besar. Sehingga akan berdampak pada harga saham perusahaan tersebut.

Menurut Brigham & Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2010:163): "...tetapi walaupun menggunakan ROE sebagai pengukuran dalam kekayaan pemegang saham sering kali memiliki korelasi tinggi, terdapat permasalahan serius yang timbul jika perusahaan hanya menggunakan ROE sebagai ukuran kinerja satu-satunya. Pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko. Jika pemegang saham jelasjelas memikirkan pengembalian, mereka juga

memikirkan risikonya. Kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang telah diinvestasikan”.

Menurut Irham Fahmi (2012:99): “..umumnya suatu perusahaan yang mempunyai ROE 12% dinilai sebagai suatu investasi yang wajar. Perusahaan –perusahan yang bisa menghasilkan ROE lebih daripada 15% secara konsisten adalah sangat luar biasa dan dinilai sebagai investasi yang wajar”.

Menurut sartono (2008:124) rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \text{Laba Setelah Pajak} \times 100\% \text{ Modal Sendiri}$$

4. *Earning per Share* (EPS)

Menurut Irham Fahmi (2012:138), pengertian *Earning per share* adalah: “..bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki”.

Menurut Kasmir (2010:116): *earning per share* adalah “...kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada pemegang sahamnya. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada pemegang sahamnya, mencerminkan semakin besar keberhasilan usaha yang dilakukannya”.

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:154): *earning per share* adalah “...rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap saham. EPS menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. Makin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena makin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham”.

Secara matematis Earning Per Share (EPS) dapat dirumuskan sebagai berikut (Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, 2006:19): Laba Bersih Jumlah saham yang beredar

$$EPS = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak} - \text{Dividen saham preferen}}{\text{Jumlah lembar saham biasa yang beredar}}$$

5. *Economic Value Added* (EVA)

Economic value added (EVA) merupakan salah satu konsep ukuran kinerja keuangan yang dicetuskan pertama oleh analisis keuangan Stern dan Stewart dalam usahanya untuk memperoleh jawaban terhadap metoda penilaian paling baik. Tujuan dari menganalisis EVA adalah untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dan sekaligus memperhatikan kepentingan dan harapan penyandang dana yaitu kreditur dan pemegang saham. Dengan metoda EVA akan diperoleh perhitungan ekonomis yang realistis karena EVA dihitung berdasarkan

biaya modal rata-rata tertimbang. Dengan demikian, kepentingan kreditur dan pemegang saham sangat diperhatikan.

Pengertian EVA menurut Tandelilin (2001:195) adalah :
 “...ukuran keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah (value added) bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja manajemen baik atau efektif (dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan), maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan”.

Menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2010:111), pengertian *Economic Value Added* (EVA) adalah: “...kelebihan laba operasi bersih setelah pajak (NOPAT) terhadap biaya modal”.

Menurut Kasmir (2010:54) bahwa: “...eva mempunyai kelebihan yang bermanfaat sebagai penilai kinerja yang berfokus pada penciptaan nilai (value creation), membuat perusahaan lebih memperhatikan struktur modal, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modal. Selain itu, manajemen dipaksa untuk mengetahui berapa the true cost of capital dari bisnisnya sehingga tingkat pengembalian bersih dari modal yang merupakan hal yang sesungguhnya menjadi perhatian para investor dapat diperhatikan secara jelas. Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan

pemegang saham. Dengan EVA, para manajer akan berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi yang memaksimalkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan”.

Adapun langkah-langkah menghitung EVA menurut Dwitayanti (2005:62) dalam Meita Rosy adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung NOPAT (Net Operating Profit After Tax) Net Operating After Tax dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NOPAT} = \text{EAT} + \text{Biaya Bunga}$$

- 2) Menghitung Invested Capital Invested

$$\text{Capital} = \text{Total Utang \& Ekuitas} - \text{Utang Jk. Pendek}$$

- 3) Menghitung WACC (*Weighted Average Cost Of Capital*)

$$\text{Rumus :WACC} = \{ (D \times r_d) (1 - \text{Tax}) + (E \times r_e) \}$$

- 4) Menghitung *Capital Charges*

$$\text{Capital charges} = \text{Invested Capital} \times \text{WACC}$$

$$\text{Tingkat modal (D)} = \frac{\text{D}}{\text{D} + \text{E}} \times 100\% \quad \text{Cost of debt (rd)} = \frac{\text{D}}{\text{D} + \text{E}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat modal dan ekuitas (E)} = \frac{\text{E}}{\text{D} + \text{E}} \times 100\%$$

$$\text{Cost of Equity (re)} = \frac{\text{E}}{\text{D} + \text{E}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pajak (tax)} = \frac{\text{Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

- 5) Menghitung *Economic Value Added* (EVA)

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - \text{Capital Charges}$$

6. *Market Value Added (MVA)*

Market Value Added (MVA) dikembangkan oleh Stern Stewart & Co, sebuah perusahaan konsultan manajemen keuangan berkantor pusat di New York (1991). MVA diyakini sebagai pengukuran kinerja keuangan untuk menilai sukses tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi pemegang sahamnya.

Menurut Suad Husnan (2006:65), pengertian Market Value Added (MVA) adalah: "...perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan ekuitas (modal sendiri)".

Menurut Brigham dan Houston (2006: 68), MVA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{MVA} = (\text{MVE} - \text{BV}) \times \text{Outstanding Shares Total Equity Outstanding}$$

2.1.6.10 Metode Pengukuran Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)* karena dengan perhitungan ROA kita dapat mengetahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan begitu nilai ROA yang bagus tentu menunjukkan

bahwa perusahaan berada dalam kondisi kinerja yang baik. (Hanafi dan Halim, 2016:81-82).

Adapun rumus ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap Profitabilitas

Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan salah satu hal yang diharapkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan tingkat pengungkapan akuntansi lingkungan yang tinggi seperti biaya-biaya lingkungan ini, diharapkan dapat menarik minat investor terhadap perusahaan yaitu dengan memberikan nilai lebih di kemudian hari kepada perusahaan yaitu dengan meningkatnya kinerja keuangan.

Menurut Kazenski (2001) bahwa jumlah pengungkapan akuntansi lingkungan yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan semakin banyak, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* dan akan meningkatkan citra perusahaan dimata investor dan masyarakat sekitar, sehingga investor akan meningkatkan modalnya diperusahaan dan masyarakat menerima

keberadaan perusahaan tersebut di lingkungannya sehingga profitabilitas yang diterima perusahaan pun meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Debby Permatasari (2017), Zahra Husna N (2015) , Unun Nur'ainun, Rini Lestari (2017) menemukan hubungan yang positif signifikan secara statistik antara pengungkapan akuntansi lingkungan dengan profitabilitas.

2.2.2. Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility (CSR) Disclosure* terhadap Profitabilitas

Perusahaan yang tidak melakukan CSR akan cenderung mendapatkan protes/demo dari masyarakat yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi perusahaan dan menimbulkan kerugian, sebaliknya perusahaan yang melakukan CSR dengan baik dapat terhindar dari protes masyarakat sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dengan efektif sehingga mencapai keuntungan dan mencapai tujuan profit keseluruhan. Peningkatan keuntungan perusahaan jelas berbanding lurus dengan peningkatan rasio-rasio profitabilitas perusahaan yang terdiri *Return On Assets (ROA)*. Peneliti menyimpulkan bahwa pernyataan diatas telah sesuai dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa CSR dapat dijadikan sebagai strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan *stakeholder* agar *stakeholder* memberikan dukungan kepada perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap pengoptimalan profitabilitas perusahaan.

Menurut Retno dan Priatninah (2012) bahwa bentuk *corporate social responsibility (CSR) disclosure* semakin banyak, maka image perusahaan semakin meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat. karena semakin baiknya citra perusahaan maka akan membuat konsumen semakin tinggi nya loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen maka, konsumen akan menyalurkan dananya untuk membeli produk dan jasa perusahaan sehingga profitabilitas pun akan meningkat.

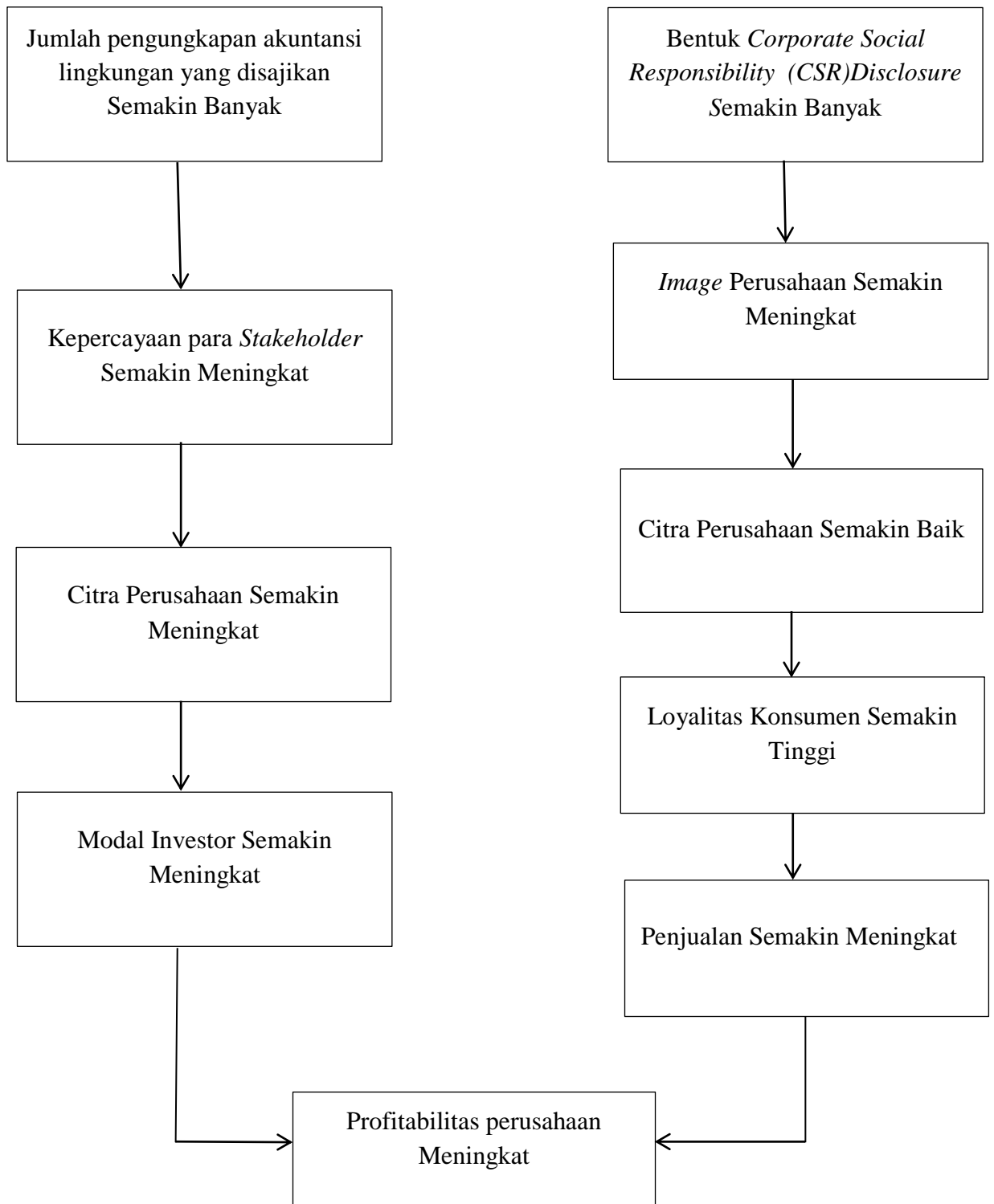
Penelitian yang dilakukan oleh Eva Sriviana (2013), Mega Kurnia dan Moch Dzalkirom (2016) menemukan hubungan yang positif signifikan antara *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* dengan profitabilitas.

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam rumusan ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Pengungkapan Akuntansi Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
- H2 : *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

Kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran